



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : RSJ ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HANIF
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 82500

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.518.700.000

1. Tanah Seluas 28050 m2 di KAB / KOTA SIMEULUE, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah Seluas 518 m2 di KAB / KOTA SIMEULUE, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. Tanah Seluas 397 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 489.700.000
5. Tanah Seluas 190 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 239.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 254.000.000

1. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU TAFT Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 118.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 121.950.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 14.200.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.908.850.000
III. HUTANG	Rp.	239.221.979
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.669.628.021

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.